



Peran ZIS sebagai Manifestasi Maqashid al-Shariah dalam Memperkuat Hubungan antara Pembangunan Manusia, Upah, dan Ketenagakerjaan terhadap Kemiskinan

Aris Yuliana¹, Mohammad Sholeh², Syifa Rohmah³

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Salatiga

³ Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

arisyuliana82@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Human Development Index (HDI), Minimum Wage, and Labor Force Participation Rate on Poverty with ZIS as a Moderating Variable in East Java from 2018 to 2023. The background of this study is based on the high number of poor people in East Java in 2023, the uneven poverty reduction targets in East Java from 2018 to 2023, and the differences in the results of previous studies. The method used was a quantitative panel data approach. The sampling technique used purposive sampling, which obtained 30 districts and cities in East Java as samples. The data analysis technique used Moderated Regression Analysis (MRA). The results showed that HDI and labor force participation rate had a negative and significant effect on poverty, while minimum wage had a positive and insignificant effect on poverty. In addition, the distribution of ZIS funds was found to moderate the effect of the minimum wage and HDI on poverty, but it was not able to moderate the effect of labor force participation rate on poverty. These findings confirm that strengthening the distribution of ZIS can be a concrete implementation of maqashid syariah in realizing social welfare and poverty reduction.

Article History

Submit : 26 June 2025

Accepted : 17 November 2025

Published : 17 November 2025

Keywords

Human Development Index, Minimum Wage, Labor Force Participation Rate, Poverty, ZIS

Publisher :

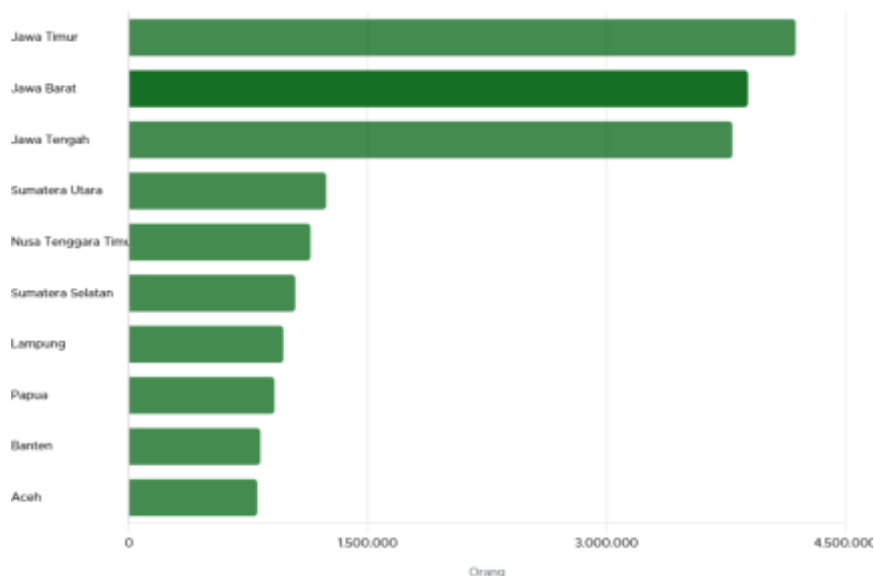
Program Studi Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kab. Pekalongan, Indonesia

PENDAHULUAN

Di negara berkembang termasuk Indonesia, kemiskinan adalah masalah yang multidimensional serta menjadi perhatian serius. Masalah kemiskinan di Indonesia terjadi karena adanya kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses ke pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar, ketergantungan dengan sektor pertanian, korupsi dan pengelolaan sumber daya yang buruk. Secara konseptual, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program strategis untuk mengurangi angka kemiskinan melalui kebijakan sosial dan ekonomi, antara lain program bantuan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar. Upaya ini ditunjukkan dengan besarnya anggaran bantuan sosial yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2023, yaitu sebesar Rp 43,68 triliun (BPS, 2023).



Gambar 1. Provinsi dengan Jumlah Penduduk Miskin terbanyak di Indonesia tahun 2023
 Sumber: www.bps.go.id

Meskipun berbagai kebijakan telah dijalankan, kemiskinan tetap menjadi permasalahan utama di berbagai provinsi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), beberapa provinsi masih menunjukkan jumlah penduduk miskin yang tinggi, salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur. Provinsi ini menduduki peringkat pertama dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia pada tahun 2023, yaitu sebanyak 4.236.510 jiwa. Faktor-faktor seperti ketimpangan distribusi pendapatan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta terbatasnya lapangan pekerjaan formal menjadi penyebab utama masih tingginya angka kemiskinan di provinsi tersebut. Walaupun tingkat kemiskinan di Jawa Timur mengalami tren penurunan, permasalahan ini tetap menjadi isu serius. Pada Maret 2023, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 10,35 persen, terdiri atas 1,703 juta jiwa di wilayah perkotaan dan 2,485 juta jiwa di wilayah perdesaan. Angka tersebut menunjukkan bahwa sekitar 4,19 juta jiwa masih hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan (BPS, 2023).

Tabel 1. Perbandingan Target Angka Kemiskinan di Jawa Timur dengan Realita Angka Kemiskinan di Jawa Timur

Tahun	Target Angka Kemiskinan di Jawa Timur (%)	Realita Angka Kemiskinan di Jawa Timur (%)
2019	10,84% - 10,42%	10,37% (Terealisasi)

2020	10,41% - 10,20%	11,09% (Tidak terealisasi)
2021	9,90% - 9,48%	11,40% (Tidak terealisasi)
2022	9,47% - 9,05%	10,38% (Tidak terealisasi)
2023	9,04% - 8,62%	10,59% (Tidak terealisasi)

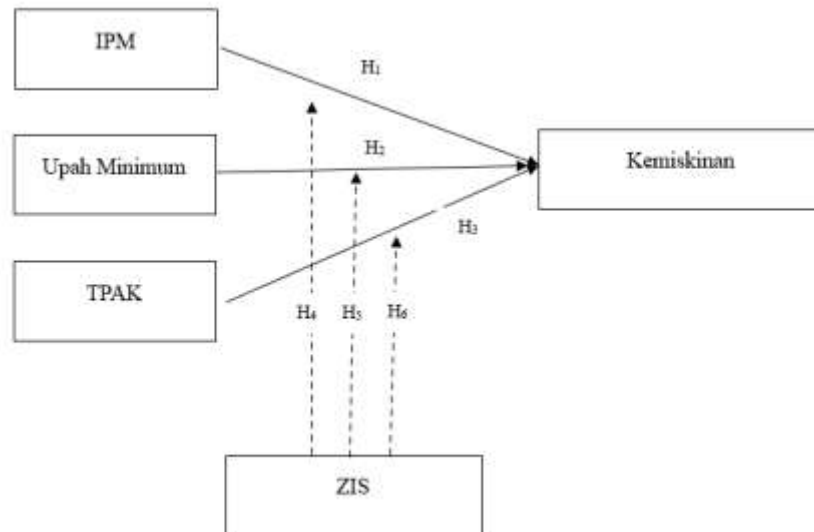
Sumber: BPS data diolah 2023

Kesenjangan antara target dan realisasi angka kemiskinan juga masih terlihat di Jawa Timur. Berdasarkan data BPS pada tabel 1, selama periode 2020–2023, pemerintah provinsi Jawa Timur belum berhasil mencapai target penurunan kemiskinan yang telah ditetapkan. Misalnya, pada tahun 2020 target penurunan kemiskinan ditetapkan sebesar 10,41%–10,20%, namun realisasinya mencapai 11,09%. Tren serupa juga terjadi pada tahun 2021 hingga 2023, di mana realisasi angka kemiskinan selalu lebih tinggi dari target. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara rencana dan pelaksanaan kebijakan, sehingga penting untuk meninjau kembali faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi tersebut.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam dan belum konsisten terkait determinan kemiskinan. Penelitian oleh Ferdiansa (2022), L. S. Hasibuan (2023) menyatakan bahwa IPM berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Sedangkan Dinata et al., (2020), Sinta & Fahrati (2022) menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Sedangkan penelitian oleh Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah & Hanifa (2021), Mauludi AC et al., (2023) menyatakan bahwa Upah Minimum berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Sedangkan penelitian oleh Faadihilah & Primadha (2023), Aleffin & Imaningsih (2024) menyatakan bahwa Upah Minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Penelitian oleh Delviera et al., (2024) menyatakan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Sedangkan penelitian oleh Muttaqin & Anwar (2023), Nagara et al., (2023), Sihite et al., (2024) menyatakan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Penelitian oleh Balqis & Nurhadi (2025) menyatakan bahwa ZIS mampu memoderasi IPM.

Mengacu pada penelitian terdahulu yang ada, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan diantaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan kualitas pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Semakin tinggi IPM suatu daerah, diharapkan semakin rendah tingkat kemiskinannya karena masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengakses lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Upah minimum yang meningkat dapat meningkatkan pendapatan pekerja dan daya beli masyarakat, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencerminkan besarnya jumlah penduduk yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan. Semakin tinggi TPAK, semakin besar potensi peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga dapat menurunkan kemiskinan. Sementara itu, faktor pemoderasi Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) berperan dalam pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan melalui mekanisme redistribusi kekayaan. Dalam konteks ini, ZIS dapat memperkuat pengaruh IPM, Upah Minimum, dan TPAK terhadap penurunan kemiskinan karena berfungsi sebagai instrumen sosial-ekonomi yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Berdasarkan uraian teoritis dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat digambarkan model penelitian dan dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Penelitian

H1: IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

H2: Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

H3: TPAK berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

H4: ZIS memoderasi hubungan antara IPM dan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

H5: ZIS memoderasi hubungan antara Upah Minimum dan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

H6: ZIS memoderasi hubungan antara TPAK dan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan dibandingkan studi sebelumnya. Pertama, penelitian ini difokuskan pada Provinsi Jawa Timur yang memiliki struktur ekonomi berbeda dengan provinsi lain seperti Jawa Tengah atau DKI Jakarta. Jawa Timur masih didominasi oleh sektor pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga faktor penyebab kemiskinan di wilayah ini memiliki karakteristik yang khas. Kedua, penelitian ini memasukkan variabel ZIS sebagai variabel moderasi yang diharapkan dapat memperkuat hubungan antara IPM, Upah Minimum, dan TPAK terhadap kemiskinan. Pendekatan ini menggabungkan unsur ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam satu model empiris, memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika kemiskinan di tingkat daerah. Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh IPM, Upah Minimum, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, serta untuk menguji peran ZIS sebagai variabel moderasi dalam hubungan antarvariabel tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel. Data panel adalah data gabungan antara data lintas tempat (*cross section*) dan runtun waktu (*time series*). Data *cross section* pada penelitian ini merupakan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur sementara data *time series* nya adalah periode pengamatan dari tahun 2018-2023. Teknik Sampling yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Purposive Sampling* atau teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan kriteria berikut.

- a. Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Timur tahun 2018-2023.
- b. Setiap Kabupaten dan Kota yang mempublikasikan laporan tahunan selama tahun 2018-2023.

Dengan demikian dapat dilihat hasil dari pemilihan data sebagai berikut:

Tabel. 2 Proses Seleksi Sampel

No	Keterangan	Akumulasi
1	Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Timur tahun 2018-2023	38
2	Kabupaten dan Kota yang mempublikasikan laporan tahunan selama periode tahun 2018-2023	30
3	Jumlah Kabupaten dan Kota yang dijadikan sampel	30
4	Periode penelitian 2018-2023 (6 tahun)	30 × 6
5	Jumlah sampel akhir	180

Sumber: BPS, Baznas

Berdasarkan informasi yang diperoleh, berikut sampel penelitian ini.

Tabel 3. Sampel Penelitian Kabupaten/Kota di Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota di Jawa Timur	No	Kabupaten/Kota di Jawa Timur
1	Pacitan	16	Madiun
2	Ponorogo	17	Magetan
3	Trenggalek	18	Ngawi
4	Tulungagung	19	Tuban
5	Malang	20	Lamongan
6	Lumajang	21	Gresik
7	Jember	22	Bangkalan
8	Banyuwangi	23	Kota Kediri
9	Bondowoso	24	Kota Blitar
10	Situbondo	25	Kota Malang
11	Probolinggo	26	Kota Probolinggo
12	Pasuruan	27	Kota Pasuruan
13	Mojokerto	28	Kota Mojokerto
14	Jombang	29	Kota Madiun
15	Nganjuk	30	Kota Batu

Sumber data didapatkan melalui data yang tersedia dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, meliputi data IPM, Upah Minimum, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, tingkat kemiskinan serta data Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) di Jawa Timur. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Uji Pemilihan Model (Uji Chow, Uji Hausman, Uji *Lagrange Multiplier*), Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikoleniertitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi), Uji Kelayakan Model (Uji R^2 , Uji F, Uji T), Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Pemilihan Model

1. Uji Chow

Uji chow digunakan untuk mengestimasi model mana yang sesuai antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Apabila nilai *Prob. Cross section chi square* dengan nilai $> 0,05$ maka metode yang dipilih adalah CEM. Sedangkan, jika nilai $< 0,05$ maka metode yang dipilih adalah FEM. Berdasarkan Uji chow yang dilakukan, menunjukkan hasil dengan nilai *Prob. Cross section chi square* $0,0000 < 0,05$. Sehingga metode *Fixed Effect Model* (FEM) yang terpilih.

Tabel 4. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	372.903076	(29,144)	0.0000
Cross-section Chi-square	779.765225	29	0.0000

Sumber : Data Sekunder Diolah 2025

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk mengestimasi mana model yang tepat antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Ranfom Effect Model* (REM). Berdasarkan hasil uji hausman nilai *prob.cross section* $0,0000 < 0,05$. Sehingga metode yang terpilih yaitu *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 5. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	36.939093	6	0.0000

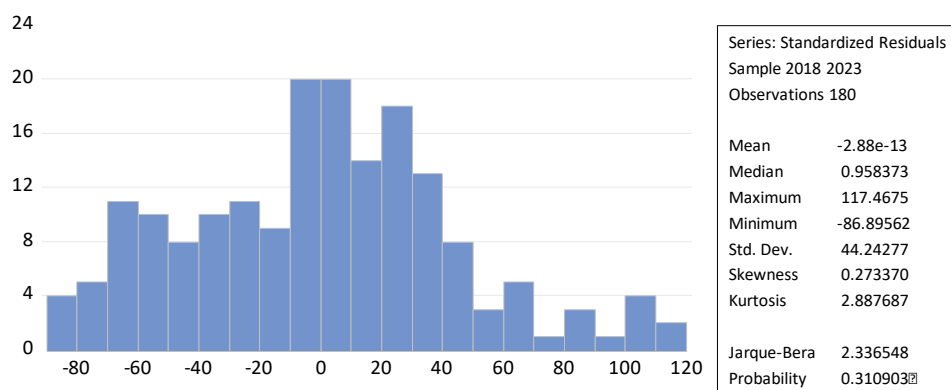
Sumber: Data Sekunder Diolah 2025

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui variabel bebas dan terikat telah terdistribusi normal apa tidak. Cara penyimpulannya adalah apabila nilai probabilitas di atas 0,05 maka dapat dikatakan normal, berbeda jika nilai probabilitas dibawah 0,05 maka data dikatakan tidak berdistribusi normal.

Gambar 6. Hasil Uji Normalitas



Sumber: hasil olah data sekunder 2025

Uji normalitas pada riset ini dapat dilihat bahwa dengan penggunaan uji *jarque-bera*, dapat dilihat bahwa nilai probability sebesar $0,310903 > 0,05$ yang menandakan bahwa data terdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual antara satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi (Ghozali, 2013). Dalam pengamatan ini mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara uji *harvey*. Uji *harvey* adalah meregresikan nilai *absolute residual* terhadap variabel independen (Ghozali, 2018:137).

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Harvey			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1.121155	Prob. F(6,173)	0.3519
Obs*R-squared	6.737148	Prob. Chi-Square(6)	0.3458
Scaled explained SS	8.255394	Prob. Chi-Square(6)	0.2200

Sumber: Data sekunder diolah 2025

Berdasarkan tabel 7 hasil uji heteroskedastisitas tersebut, nilai probability $> 0,05$ yang menandakan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolenieritas

Uji multikolenieritas digunakan untuk memeriksa apakah terdapat hubungan atau tidak antara variabel independen atau dependen. Model regresi yang bagus memiliki model yang didalamnya atau dapat dikatakan tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen. Uji multikolenieritas menelik nilai *Tolerance* < 0.10 atau nilai *VIF* > 10 . Jika nilai *tolerance* > 0.10 atau sama dengan nilai *VIF* < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolenieritas antar variabel dalam model regresi (Ghozali, 2013).

Tabel 8. Hasil Uji Multikolenieritas

Variance Inflation Factors			
Date: 05/20/25 Time: 14:19			
Sample: 1 180			
Included observations: 180			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	9139.505	861.4799	NA
X1	0.982129	497.0613	1.917234
X2	4.66E-11	27.05696	2.167338
X3	1.531027	726.4216	1.935624
X1Z	8.87E-20	1032.943	517.4622
X2Z	2.59E-30	53.42937	34.42322
X3Z	6.49E-20	708.6534	353.1830

Sumber: Data sekunder diolah 2025

Pada tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa nilai *Centered Variance Inflation Factor* (VIF) dari keseluruhan variabel terdapat 3 variabel yang kurang dari 10, dengan demikian menandakan bahwa model regresi tidak lolos uji multikolenieritas. Oleh karena itu, diperlukan penyembuhan dengan menghapus variabel yang saling berpengaruh yaitu X1Z dan X2Z dari uji multikolenieritas.

Tabel 9. Penyembuhan Uji Multikolenieritas

Variance Inflation Factors
Date: 05/20/25 Time: 16:01
Sample: 1 180
Included observations: 180

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	8697.252	827.4163	NA
X1	0.569912	291.1181	1.122883
X2	2.54E-11	14.88031	1.191955
X3	0.842231	403.3265	1.074704
X3Z	2.03E-22	2.242783	1.117772

Sumber: Data sekunder diolah 2025

Berdasarkan tabel 9 setelah dilakukan penyembuhan pada uji multikolenieritas nilai VIF < 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data tidak terdapat multikolenieritas pada penelitian ini.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 10. Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.995035	Mean dependent var	101.1373
Adjusted R-squared	0.993913	S.D. dependent var	70.49326
S.E. of regression	5.499987	Akaike info criterion	6.415796
Sum squared resid	4416.480	Schwarz criterion	7.018910
Log likelihood	-543.4217	Hannan-Quinn criter.	6.660333
F-statistic	886.6439	Durbin-Watson stat	2.357376
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data sekunder diolah 2025

Dari tabel 10 di atas, hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai *Durbin-Watson stat* sebesar 2.357376. berdasarkan perhitungan $(4-d) = 1,643964$ yang mana tidak berada pada rentang nilai dL dan dU yaitu masing-masing sebesar 1,7224 dan 1,7901. Dengan cara ini, dapat diasumsikan bahwa data tersebut mengandung autokorelasi. Sehingga perlu dilakukan penyembuhan agar data tidak terdeteksi gejala autokorelasi.

Tabel 11. Penyembuhan Uji Autokorelasi

R-squared	0.994987	Mean dependent var	100.9425
Adjusted R-squared	0.993331	S.D. dependent var	70.38858
S.E. of regression	5.748166	Akaike info criterion	6.550169
Sum squared resid	3700.638	Schwarz criterion	7.312863
Log likelihood	-453.2627	Hannan-Quinn criter.	6.860028
F-statistic	600.8248	Durbin-Watson stat	1.911159
Prob(F-statistic)	0.000000		
Inverted AR Roots	-.12		

Sumber: Data sekunder diolah 2025

Hasil penyembuhan uji autokorelasi menunjukkan nilai *Durbin-Watson stat* sebesar 1,911159 yang mana tidak berada pada nilai dU dan 4-dU yang menunjukkan nilai 1,7901 dan 2,3194. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Penyembuhan

uji autokorelasi ini menggunakan model ARIMA yaitu proses mengintegrasikan model ARIMA pada residual regresi untuk menghilangkan autokorelasi, sehingga residual menjadi noise putih/*white noise* (Box et al., 2015).

C. Uji Kelayakan Model

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 12. Hasil Uji R^2

R-squared	0.995197	Mean dependent var	101.1373
Adjusted R-squared	0.993988	S.D. dependent var	70.49326
S.E. of regression	5.465886	Akaike info criterion	6.415928
Sum squared resid	4272.255	Schwarz criterion	7.072258
Log likelihood	-540.4336	Hannan-Quinn criter.	6.682042
F-statistic	823.0641	Durbin-Watson stat	2.415248
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data sekunder diolah 2025

Hasil analisis dalam tabel 12 menunjukkan koefisien determinasi yaitu sebesar 0.995197 atau 99,51%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mempengaruhi 99,51% terhadap variabel kemiskinan, sedangkan sisanya sebanyak 0,49% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

2. Uji F

Tabel 13. Hasil Uji F

R-squared	0.995197	Mean dependent var	101.1373
Adjusted R-squared	0.993988	S.D. dependent var	70.49326
S.E. of regression	5.465886	Akaike info criterion	6.415928
Sum squared resid	4272.255	Schwarz criterion	7.072258
Log likelihood	-540.4336	Hannan-Quinn criter.	6.682042
F-statistic	823.0641	Durbin-Watson stat	2.415248
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data sekunder diolah 2025

Uji ini dimaksudkan untuk menentukan apakah semua variabel independen yang digunakan secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Penelitian ini dapat menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 0.05. sesuai dengan nilai signifikansi tersebut, maka dapat ditentukan apakah model regresi untuk pengujian hipotesa sudah sesuai/baik (Ghozali, 2013).

Berdasarkan hasil uji pada tabel 13, diketahui nilai prob (F-statistic) 0.000000 < 0,05. Artinya menunjukkan variabel IPM, Upah Minimum, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan distribusi ZIS sebagai variabel moderasi dapat berpengaruh terhadap kemiskinan secara bersama-sama (simultan).

3. Uji T dan MRA

Tabel 14. Hasil Uji T dan MRA

—Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	126.7375	50.03009	2.533226	0.0124
X1	-0.296612	0.817339	-0.362899	0.0172
X2	4.57E-06	4.77E-06	0.957678	0.3398
X3	-0.197571	0.309186	-0.639005	0.0238
Z	1.36E-08	8.98E-09	1.520217	0.1307
X1Z	-2.40E-10	1.12E-10	-2.149563	0.0333
X2Z	4.99E-16	3.66E-16	1.361413	0.0175
X3Z	3.28E-11	6.71E-11	0.489078	0.6255

Sumber: Data sekunder diolah 2025

Berdasarkan hasil analisis tabel 14, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

- a) Variabel Indeks Pembangunan Manusia diperoleh koefisien negatif sebesar -0.296612 dan nilai probabilitas sebesar $0,0172 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan sehingga H1 diterima.
- b) Variabel Upah Minimum diperoleh koefisien positif sebesar 4.57E-06 dan nilai probabilitas sebesar $0,3398 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan sehingga H2 ditolak.
- c) Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja diperoleh koefisien negatif sebesar -0.197571 dan nilai probabilitas sebesar $0.0238 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh negatif dan signifikan sehingga H3 diterima.
- d) Variabel Indeks Pembangunan Manusia yang dimoderasi oleh ZIS diperoleh koefisien negatif sebesar -2.40E-10 dan nilai probabilitas sebesar $0,0333 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa ZIS mampu memoderasi Indeks Pembangunan Manusia pada kemiskinan sehingga H4 diterima.
- e) Variabel Upah Minimum yang dimoderasi oleh ZIS diperoleh koefisien positif sebesar 4.99E-16 dan nilai probabilitas sebesar $0,0175 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa ZIS mampu memoderasi Upah Minimum pada kemiskinan sehingga H5 diterima.
- f) Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang dimoderasi oleh ZIS diperoleh koefisien positif sebesar 3.28E-11 dan nilai probabilitas sebesar $0,6255 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa ZIS tidak mampu memoderasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada kemiskinan sehingga H6 ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

Hasil analisis IPM memperlihatkan bahwa nilai probabilitas sebesar $0,0172 < 0,05$ dengan koefisien -0.296612 yang menandakan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan maka H1 diterima. Artinya, semakin tinggi IPM akan mengindikasikan penurunan kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dinata et al., (2020), Paizal & Sukmawati (2021) dan Khaqiqi (2021) yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdiansa (2022) dan Hasibuan (2023) yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan.

Secara konseptual, peningkatan IPM mencerminkan perbaikan dalam tiga aspek utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Ketika masyarakat memperoleh pendidikan yang lebih baik, masyarakat memiliki kemampuan dan keterampilan yang lebih tinggi untuk bersaing di pasar kerja, sehingga peluang mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan layak juga meningkat. Selain itu, tingkat kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan produktivitas kerja,

sementara peningkatan pendapatan per kapita akan memperluas daya beli masyarakat. Ketiga aspek tersebut secara bersama-sama berkontribusi dalam mengurangi jumlah penduduk miskin.

Dalam konteks Provinsi Jawa Timur, pengaruh IPM terhadap kemiskinan menjadi sangat relevan mengingat provinsi ini memiliki variasi tingkat pembangunan manusia yang cukup lebar antarwilayah. Berdasarkan data BPS (2023), nilai IPM Jawa Timur berada pada angka 72,14, yang masih lebih rendah dibandingkan provinsi seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup antara wilayah di Jawa Timur. Ketimpangan pembangunan manusia antarwilayah tersebut berdampak langsung terhadap distribusi tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Oleh karena itu, IPM yang tinggi dapat mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang baik, sehingga peningkatan kualitas masyarakat dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah. IPM dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam menilai pembangunan manusia dan menjadi acuan pembangunan yang berhubungan dengan kemiskinan. Dengan demikian tingkat IPM yang tinggi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan juga menurunkan angka kemiskinan.

Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kemiskinan

Hasil analisis upah minimum dengan koefisien sebesar $4.57E-06$ dan nilai probabilitas sebesar $0,3398 > 0,05$. Yang menandakan bahwa Upah Minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan, maka H_2 ditolak, yang artinya bahwa upah minimum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur pada periode 2018-2023. Hasil ini tidak sesuai dengan teori oleh Ragnar Nurkse yang menjelaskan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah dikarenakan produktivitas rendah, maka akan menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Berdasarkan teori, semakin tinggi upah minimum akan menurunkan kemiskinan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori tersebut karena upah minimum tidak efektif dalam menurunkan kemiskinan. Apabila upah minimum mengalami kenaikan di atas produktivitas, maka dapat mengurangi lapangan kerja yang disebabkan karena PHK dan menurunnya penyerapan tenaga kerja terutama bagi pekerja yang memiliki pendidikan rendah atau usia muda.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Millenia & Zaini (2021) yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Faadihilah & Primadha, (2023) dan Aleffin & Imaningsih, (2024) yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Realitanya upah minimum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan yang disebabkan berbagai hal, salah satu kemungkinannya yaitu adanya faktor biaya sosial dari inflasi yang menyebabkan tingkat harga barang dan jasa selalu meningkat sehingga menjadikan standar kebutuhan layak juga meningkat. Jika dikaitkan dengan biaya sosial dari inflasi, maka kenaikan upah minimum seolah-olah tidak terasa dampaknya ketika inflasi terus meningkat. Jika dikaitkan dengan biaya sosial dari inflasi, maka upah minimum meningkat seiring dengan jumlah penduduk miskin yang terus meningkat (Rivana & Gani, 2024).

Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Kemiskinan

Hasil analisis tingkat partisipasi angkatan kerja dengan koefisien sebesar -0.197571 dan nilai probabilitas sebesar $0.0238 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh negatif dan signifikan sehingga H_3 diterima. Artinya, semakin besar Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja akan mengindikasikan penurunan kemiskinan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muttaqin & Anwar, (2023) dan Sihite et al., (2024) yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Delviera et al., (2024) yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Secara teoritis, peningkatan TPAK menunjukkan semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif berpartisipasi dalam

kegiatan ekonomi, baik di sektor formal maupun informal. Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga, yang pada gilirannya menurunkan tingkat kemiskinan.

TPAK menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana suatu perekonomian mampu menyerap tenaga kerja produktif dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Dalam konteks Provinsi Jawa Timur, hubungan negatif antara TPAK dan kemiskinan dapat dijelaskan melalui struktur ekonomi wilayah yang masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan industri kecil menengah. Berdasarkan data BPS (2023), TPAK Jawa Timur mencapai 70,13 persen, angka yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 69,3 persen. Tingginya TPAK ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di Jawa Timur telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi, meskipun sebagian besar masih bekerja di sektor informal. Kecenderungan ini menggambarkan bahwa semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif, maka semakin besar pula peluang untuk memperoleh penghasilan, sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, peningkatan TPAK akan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja yang dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. TPAK yang tinggi dapat mencerminkan banyaknya orang yang aktif bekerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan seseorang. Apabila TPAK meningkat, maka dapat mengurangi pengangguran dan menurunkan kemiskinan di suatu daerah.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan yang di moderasi ZIS

Hasil analisis IPM yang dimoderasi ZIS diperoleh koefisien sebesar sebesar $-2.40E-10$ dan nilai probabilitas sebesar $0,0333 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa IPM yang dimoderasi oleh ZIS berpengaruh negatif dan signifikan sehingga H4 diterima. Artinya, ZIS memoderasi pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Balqis & Nurhadi (2025) yang menyatakan bahwa ZIS mampu memoderasi IPM terhadap kemiskinan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifa & Waluyo (2023) dan Nengsih et al., (2022) yang menyatakan bahwa ZIS tidak mampu memoderasi IPM terhadap kemiskinan. Secara konseptual, peningkatan IPM menggambarkan perbaikan dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Namun, pembangunan manusia yang bersifat materialistik saja belum cukup untuk menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan apabila tidak diimbangi dengan pendekatan spiritual dan sosial. Di sinilah peran ZIS menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai instrumen redistribusi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana penguatan kesejahteraan sosial yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, tujuan utama ekonomi Islam adalah tercapainya kemaslahatan (masalah) bagi seluruh manusia melalui penjagaan lima aspek pokok kehidupan, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Implementasi ZIS dalam konteks pembangunan manusia sejalan dengan prinsip maqashid ini. Melalui ZIS, kebutuhan dasar masyarakat miskin dapat terpenuhi (hifz al-nafs), akses terhadap pendidikan dan pengetahuan meningkat (hifz al-'aql), serta harta terdistribusi secara adil dalam masyarakat (hifz al-mal). Dengan demikian, ZIS tidak hanya berperan dalam pengentasan kemiskinan secara ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan spiritual dalam masyarakat.

Pendayagunaan ZIS secara produktif akan memperkuat keterkaitan antara peningkatan IPM dan penurunan kemiskinan, karena penerima manfaat ZIS tidak hanya mendapatkan bantuan sementara, tetapi juga mengalami peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan semangat maqashid syariah, di mana kesejahteraan tidak hanya dilihat dari aspek materi, tetapi juga dari kemampuan individu untuk hidup bermartabat, mandiri, dan bermanfaat bagi lingkungannya.

Pengaruh Upah Minimum terhadap Kemiskinan yang di moderasi ZIS

Hasil analisis Upah Minimum yang dimoderasi ZIS diperoleh koefisien sebesar sebesar $4.99E-16$ dan nilai probabilitas sebesar $0,0175 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum yang dimoderasi oleh ZIS berpengaruh positif dan signifikan sehingga H_5 diterima. Artinya, ZIS mampu memoderasi Upah Minimum terhadap kemiskinan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiowati (2023) yang menyatakan bahwa ZIS mampu memoderasi Upah Minimum terhadap kemiskinan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifa & Waluyo (2023) yang menyatakan bahwa ZIS tidak mampu memoderasi Upah Minimum terhadap kemiskinan.

Kenaikan upah minimum berdampak langsung pada peningkatan daya beli masyarakat dan pengurangan jumlah penduduk miskin. Dengan meningkatnya pendapatan pekerja, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar juga meningkat, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, dalam sistem ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan individu, tetapi juga dari distribusi kekayaan yang adil dan pemenuhan kebutuhan sosial. Dalam hal ini, ZIS berperan sebagai mekanisme pemerataan pendapatan yang dapat memperkuat efek ekonomi dari kebijakan upah minimum. Ketika upah minimum meningkat, individu yang memperoleh pendapatan lebih tinggi akan memiliki kemampuan finansial untuk menunaikan kewajiban zakat serta menyalurkan sebagian hartanya melalui infak dan sedekah. Dana ZIS yang terhimpun kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk bantuan konsumtif maupun program pemberdayaan ekonomi produktif. Dengan demikian, ZIS berfungsi sebagai jembatan keadilan sosial yang memastikan bahwa manfaat peningkatan upah tidak hanya dinikmati oleh kelompok pekerja formal, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat miskin dan rentan.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, fenomena ini mencerminkan tujuan utama syariah dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Melalui distribusi zakat dan infak, kekayaan tidak terakumulasi pada segelintir pihak, tetapi tersebar secara merata untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, peningkatan pendapatan pekerja memungkinkan untuk menunaikan kewajiban zakat, yang sekaligus membersihkan harta (*tazkiyah al-mal*) dan jiwa (*tazkiyah al-nafs*). Dengan kata lain, implementasi kebijakan upah minimum yang selaras dengan nilai-nilai zakat mencerminkan keharmonisan antara pembangunan ekonomi dan pencapaian tujuan maqashid syariah dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Kemiskinan yang di moderasi ZIS

Hasil analisis TPAK yang dimoderasi ZIS diperoleh koefisien sebesar sebesar $3.28E-11$ dan nilai probabilitas sebesar $0,6255 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang dimoderasi oleh ZIS berpengaruh positif dan tidak signifikan sehingga H_6 ditolak. Artinya, ZIS tidak mampu memoderasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap kemiskinan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifa & Waluyo (2023) yang menyatakan bahwa ZIS tidak mampu memoderasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap kemiskinan. Peningkatan TPAK seharusnya mencerminkan meningkatnya jumlah penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik di sektor formal maupun informal. Akan tetapi, jika tidak disertai dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai dan dukungan pembiayaan usaha yang produktif, peningkatan partisipasi angkatan kerja tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Dalam hal ini, peran ZIS sebagai instrumen keuangan sosial Islam seharusnya mampu memperkuat hubungan tersebut dengan menyediakan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan bagi masyarakat miskin agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif. Namun demikian, dana ZIS yang seharusnya diberikan kepada masyarakat dan dimanfaatkan untuk modal usaha dan UMKM agar dapat membantu masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran, faktanya pendistribusiannya masih berfokus pada kegiatan konsumtif. Kecenderungan penyaluran dana ZIS secara konsumtif juga dapat menciptakan efek negatif terhadap perilaku ekonomi masyarakat miskin. Ketika bantuan lebih

banyak bersifat pemberian langsung tanpa diiringi dengan pembinaan atau pemberdayaan, sebagian masyarakat cenderung menjadi pasif dan bergantung pada bantuan tersebut. Kondisi ini dapat menghambat semangat kerja dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pengangguran dan stagnasi tingkat partisipasi angkatan kerja.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, hal ini menunjukkan bahwa fungsi ZIS belum sepenuhnya mencapai tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*) dan jiwa (*hifz al-nafs*) secara optimal. Prinsip utama maqashid syariah dalam konteks ekonomi adalah mendorong kemaslahatan (*maslahah*) melalui pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, bukan ketergantungan. Oleh karena itu, distribusi ZIS yang terlalu fokus pada aspek konsumtif belum mencerminkan semangat *tazkiyah al-mal* (penyucian harta) yang diiringi dengan *tazkiyah al-nafs* (penyucian jiwa). Pendistribusian yang lebih produktif akan lebih sesuai dengan tujuan maqashid syariah dalam meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data penelitian mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), upah minimum, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap kemiskinan dengan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sebagai variabel moderasi di Provinsi Jawa Timur periode 2018–2023, dapat disimpulkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti peningkatan IPM mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Upah minimum menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan, menandakan bahwa kenaikan upah minimum tidak selalu diikuti dengan penurunan kemiskinan. Tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya peningkatan partisipasi tenaga kerja dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, ZIS terbukti mampu memoderasi hubungan antara IPM dan upah minimum terhadap kemiskinan, namun tidak mampu memoderasi hubungan antara tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap kemiskinan di Jawa Timur pada periode 2018-2023. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek *hifz al-māl* (menjaga harta) dan *hifz al-nafs* (menjaga kehidupan), di mana peningkatan kesejahteraan dan distribusi ekonomi yang adil melalui mekanisme ZIS berperan penting dalam mengurangi kesenjangan dan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya minimnya penelitian terdahulu yang secara langsung mendukung teori hubungan antara variabel-variabel penelitian, terutama mengenai peran ZIS sebagai variabel moderasi dalam konteks pengentasan kemiskinan. Selain itu, pengukuran kemiskinan pada penelitian ini terbatas pada penggunaan variabel IPM, upah minimum, dan TPAK. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk menambah variabel lain yang relevan yang dapat mengembangkan variabel kemiskinan serta memperluas cakupan wilayah dan periode penelitian agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan mendalam.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis, teoritis, dan kebijakan. Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas manusia melalui IPM dan partisipasi tenaga kerja untuk menekan angka kemiskinan, serta optimalisasi pengelolaan ZIS sebagai instrumen ekonomi Islam yang mampu memperkuat efek kebijakan upah minimum terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara teoritis, hasil penelitian memperkaya literatur mengenai ekonomi Islam, terutama dalam integrasi konsep maqasid syariah dengan kebijakan ekonomi daerah. Sedangkan secara kebijakan, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan lembaga pengelola zakat untuk memperkuat sinergi program pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah yang berorientasi pada pemerataan dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, & Al-Hasan, A. (2010). Tujuan dan Prinsip Hukum Islam. *Maqashid Al-Shari'ah*.
- Aleffin, G. S., & Imaningsih, N. (2024). Pengaruh Upah Minimum, TPT, Dependency Ratio dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jambura Economic Education Journal*, 6(2), 419–432. <https://doi.org/10.37479/jeej.v6i2.24860>
- Badan Pusat Statistik. (2023). <https://www.bps.go.id>. 17 Juli 2023.
- Balqis, Z. N. P., & Nurhadi, B. (2025). Dampak jumlah penduduk, upah minimum dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan: Peran ZIS sebagai variabel moderasi di Jawa Tengah. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(1), 61-72.
- Basuki, A. T. (2019). Buku Praktikum Eviews. *Danisa Media*.
- Box, G. E. P., Reinsel, G. C., Jenkins, G. M., & Ljung, G. M. (2015). *Time Series Analysis Forecasting and Control* (5th ed.).
- BPS. (2020). *Profil Kemiskinan*. <https://www.bps.go.id>
- BPS. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia*. <https://www.bps.go.id>
- Delviera, A., Amar, S., Model, R. E., Model, R. E., & Artikel, I. (2024). *Pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum dan investasi terhadap kemiskinan di indonesia*.
- Dinata, S. R., Romus, M., & Yanti. (2020). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2003-2018. *Jurnal Al-Iqtishad*, 2, 116–137.
- Faadihilah, G. F., & Primadha, W. P. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bekasi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(5), 1794–1801. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1462>
- Ferdiansa. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Sulawesi Tenggara. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 175–181. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i3.131>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi* (7th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, A. (2018). View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk. *Ekbis*, 274–282.
- Hanifah, S., & Hanifa, N. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lamongan. *Independent: Journal of Economics*, 1(3), 191–206. <https://doi.org/10.26740/independent.v1i3.43632>
- Hasibuan, L. S. (2023). Analisis Pengaruh Ipm, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 8(1), 53–62. <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JP2SH/article/view/2075/1261>
- Khaqiqi, N. (2021). Analisis pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, inflasi, dan upah terhadap kemiskinan. *JIEF Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 24-40.
- Lutfi, M. (2023). Implementasi Maqashid Syariah pada Zakat Produktif di Baznas Dki Jakarta

- dan Laz Dompet Dhuafa. *An Nawawi*, 3(1), 43–52.
<https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i1.30>
- Madania, S., & Mubarak, Z. (2023). Can Economic Growth, HDI, and Zis Contribute to Poverty Reduction In South Kalimantan? *Jurnal Ecodemica : Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 7(1), 16–22. <https://doi.org/10.31294/eco.v7i1.14412>
- Mankiw, N. G. (2012). *Principles of Economics* (6th ed.). Cengage Learning.
- Mauludi AC, Fadllan, & Fitri Nur Rahmawati. (2023). Pengaruh Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017 s/d 2021. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10(1), 68–83.
<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v10i1.8945>
- Milhan. (2021). Maqashid Syari'ah menurut Imam Syatibi dan Dasar Pembentukannya Teori. *Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah*, 06(01), 83–102.
- Millenia, E., & Zaini, D. (2021). Pengaruh Upah Minimum , Tingkat Pengangguran Terbuka , Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di. *Ecosains*, 10(November), 106–114.
- Muttaqin, M., & Anwar, K. (2023). Pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi*, 2(2), 83–95. <https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v2i1.266>
- Nagara, P., Irawan, L., Nurtati, & Nasfi. (2023). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan dalam Islam dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan. *Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Dalam Islam dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan*, 4(2), 332.
- Nengsih, T. A., Andriani, B. F., & Sugiharto, J. (2022). Pengaruh PDRB, TPAK, IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Zakat sebagai Variabel Moderasi di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022. *Arzusun*, 4, 264–290.
- Paizal, M., & Sukmawati, S. (2021). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Kemiskinan Di Kalimantan Barat. *JIEF Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 41–51.
- Pratama & Cahyono. (2021). *Metodologi Penelitian Bisnis dengan Pendekatan Kuantitatif* (W. Widarjo (ed.); Vol. 11, Issue 1). LaksBang PRESSindo.
- Prawoto, N., & Basuki, A. T. (2016). *Analisis Regresi dalam penelitian Ekonomi dan Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews*. PT Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Y. (2006). *Hukum Zakat*. Pustaka Al-Kautsar.
- Rahmani. (2021). Pengaruh Gender Ratio, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *JIMFEB*.
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7673>
- Rifa, A. L., & Waluyo, A. (2023). Pengaruh Tenaga Kerja , Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan dengan Zakat sebagai Variabel Moderasi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020. *Ekomaks*, 12(September), 290–298.
- Rivana, M., & Gani, I. (2024). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia serta Upah Minimum terhadap Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Dan*

Keuangan, 20(1), 1–20.

- Setiowati, G. (2023). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2016-2022 Dengan Penyaluran Dana ZIS Sebagai Variabel Moderasi*. Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Sihite, A., Berutu, E., Andiny, P., Martahadi, & Safuridar. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(2), 247–261.
- Sinta & Fahrati. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan DiKabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2019. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(1), 81–97.
- Subri, M. (2002). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Raja Grafindo Persada.
- Suciati, S. (2024). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan dengan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) Sebagai Variabel Moderasi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2005). *Pengantar Mikro Ekonomi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2011). *Makroekonomi:Teori Pengantar*. Rajawali Press.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development* (11th ed.). Pearson.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai. Panduan Eviews* (5th ed.). UPP STIM YKPN.
- Yudiana, F. E., & Puspita, R. E. (2021). *Metodologi Penelitian Manajemen Pemasaran dan Bisnis Islam*. Kencana.